



RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya jualah maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 dapat diselesaikan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun ke depan, dan dapat lebih memacu gerak dan langkah pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

#

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum4

1.3. Maksud dan Tujuan.....6

1.4. Sistematika Penulisan.....7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika28

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi
Dan Informatika.....28

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD31

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika50

3.3. Program Dan Kegiatan52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....63

BAB V PENUTUP74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target9

Tabel 2.2. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target12

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang14

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat28

Tabel 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat31

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat46

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang52

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 202363

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan strategis. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju satu tahun ke depan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026, analisis atas asupan dari para pemangku kepentingan di tingkat Kota, dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan baik nasional maupun daerah Kalimantan Barat. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini juga disusun dengan berpedoman pada rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 2023-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Kota Singkawang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut.

Proses perencanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2023 dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri tersebut mengatur secara rinci tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tahapan proses perencanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang membentuk susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dan memberikan orientasi berupa arahan dan pemahaman mengenai Rencana Kerja (Renja) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang kepada seluruh anggota Tim.

2. Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) yang telah terbentuk menyusun rencana kegiatan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja Tim.
3. Tim melakukan pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan daftar data dan informasi yang dibutuhkan. Data dan informasi tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang sesuai untuk kebutuhan analisis.

Dalam proses penyusunan rencana kerja, suatu organisasi biasanya melibatkan banyak pihak dan menggunakan berbagai sumber dalam menganalisis keadaan organisasi dan kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berkompetisi. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini tim melibatkan seluruh pejabat struktural dan sub koordinator dalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang untuk memberikan tanggapan dan/atau asupan sebagai evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam 1 tahun terakhir.

Seperti dikemukakan di atas bahwa perencanaan kerja adalah suatu proses dan oleh karena itu ia memiliki masukan, kegiatan, keluaran, dan capaian. Perlu disadari bahwa setiap proses memiliki berbagai kendala. Beberapa elemen dari proses adalah bersifat rutin (berkelanjutan) dan yang lainnya dilaksanakan sebagai proyek yang memiliki awal dan akhir yang definitif selama suatu periode.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dalam hal ini Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang bukanlah suatu dokumen perencanaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan organisasi induknya yaitu Pemerintah Kota Singkawang. Selanjutnya, dokumen perencanaan Kota Singkawang merupakan bagian terintegrasi dari dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian dan Lembaga Negara, dan seterusnya hingga perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara vertikal, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota perangkat daerah disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Singkawang 2023- 2026. Secara horizontal, Rencana Kerja (Renja) ini juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) berbagai perangkat daerah yang secara organisatoris berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1868);
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2 No. Reg. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 2-75/2019);
 - 18) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
 - 19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

- 20) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
- 21) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
- 22) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;
- 23) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- 24) Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- 25) Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/492/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub- Subtansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- b. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.
- c. Mewujudkan kesinergian di antara unit-unit kerja atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan para pemangku kepentingan di lingkungan Kota Singkawang perihal program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

| | | |
|----------------|----------|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| | | 1.1. Latar Belakang |
| | | 1.2. Landasan Hukum |
| | | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | | 1.4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | : | HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022 |
| | | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | : | TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional |
| | | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 3.3. Program dan Kegiatan |
| | | 3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 |
| | | 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | | 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis |
| BAB IV | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| BAB V | : | PENUTUP |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kota Singkawang Tahun 2023 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra SKPD.

2.1.1. Faktor- Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Di samping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.1.
Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

| URAIAN PROG/KEG | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | 2 Perwako 17.097.100 | 2 Perwako 12.161.000 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | 300 Konten 259.466.600 | 337 Konten 220.956.355 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Pengelolaan media komunikasi publik | 700 Berita 628.632.900 | 723Berita 608.023.590 | | |
| Pelayanan informasi publik | 45 Dokumen 215.232.500 | 49 Dokumen 211.529.325 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Kemitraan dengan pemangku kepentingan | 100 Orang 17.477.400 | 100 Orang 11.061.355 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | 2 Kegiatan 62.044.600 | 2 Kegiatan 50.074.250 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan | 76 Sistem 12 server | 76 Sistem 12 server | Tidak Ada | Tidak Ada |

Renja 2024

| | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|
| sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 45.144.000 | 28.565.850 | | |
| Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah | 29 OPD 10 CCTV 1 Menara Telekomunikasi 1.509.617.600 | 29 OPD 10 CCTV 1 Menara Telekomunikasi 1.490.347.042 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | 3 Aplikasi 19.719.200 | 3 Aplikasi 19.504.500 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | 3 Aplikasi 13.346.200 | 3 Aplikasi 13.189.500 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | 18 Aplikasi 84.395.300 | 18 Aplikasi 79.402.500 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | 2,5 121.928.900 | 2,60 99.305.500 | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektor | 2 Buku 174.441.200 | 2 Buku 160.678.612 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen 36.031.500 | 1 Dokumen 34.213.828 | Tidak Ada | Tidak Ada |

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Ketercapaian sasaran strategis perspektif *stakeholder* sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

Tabel 2.2.

Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

| URAIAN PROG/KEG | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|
| Layanan hubungan media | 12 Kegiatan 12.465.200 | 7 Kegiatan 3.642.620 | OPD selaku leading sector tidak bersedia untuk menyelenggarakan konferensi pers, Pimpinan lebih sering diwawancara di lapangan | Mengurangi target capaian kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya |

2.1.2. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dikarenakan terdapat beberapa program pada tahun akhir 2022 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dikarenakan terjadinya refocusing anggaran, sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 - 2022. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 – 2022 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada penyesuaian target capaian pada Renstra 2018 - 2022.

2.1.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2024 dan Renstra 2023 – 2026.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Target Progra m dan Kegiat an (Renja Perang kat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 | |
|----------|---|--|---|--|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2.10.01. | Dinas Komunikasi Dan Informatika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.10. | Komunikasi Dan Informatika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01. | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dok | 2 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | 2 dok | 1 dok | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------------|-------------|---------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | |
| 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | 5 dok | 1 dok | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 100% | 35 orang / bulan | 0 | 0 | 35 orang / bulan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.02.02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 100% | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 Dokum en | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 dok | 1 dok | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi umum perangkat daerah | Persentase pelayanan administrasi umum | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 100% | 1 paket | 0 | 0 | 1 paket | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 100% | 1 paket | 0 | 0 | 1 paket | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 100% | 1 paket | 0 | 0 | 1 paket | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100% | 100% | 1 dokumen | 0 | 0 | 1 dokumen | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 100% | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 100% | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100% | 100% | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 % | 100% | 1 laporan | 0 | 0 | 1 laporan | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100% | 100% | 2 unit | 0 | 0 | 2 unit | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|----------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.01.2.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 200% | 100% | 1 unit | 0 | 0 | 1 unit | 0 | 0 |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik | 100% | 106,63% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah | 100% | 106,63% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01.01 | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 2 perwako | 2 perwako | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|---------|---|---|---------|---|---|
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 200 konten | 337 konten | 300 dok | 0 | 0 | 300 dok | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1400 berita | 723 berita | 800 dok | 0 | 0 | 800 dok | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan informasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 90 dok | 49 dok | 4 dok | 0 | 0 | 4 dok | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan hubungan media | Jumlah konferensi pers/kunjungan pers, pertemuan dengan media dan liputan media yang dilaksanakan | 24 kegiatan | 7 kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan pemangku kepentingan | Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi | 2600 orang | 100 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik | 29 OPD | 2 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Penerapan aplikasi e-Government | 100% | 100,5% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.16.03.2.02 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah domain dan subdomain Pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat | 76 sistem, 12 server | 76 sistem, 12 server | 85 sub domain, 12 server | 0 | 0 | 85 sub domain, 12 server | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.03 | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 29 OPD, 10 CCTV, 1 menara telekomunikasi | 29 OPD, 10 CCTV, 1 menara telekomunikasi | 81 unit kerja | 0 | 0 | 81 unit kerja | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten / kota | Persentase pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota | 100% | 101% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 6 aplikasi | 3 aplikasi | 3 perangkat daerah | 0 | 0 | 3 perangkat daerah | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 6 aplikasi | 3 aplikasi | 3 unit | 0 | 0 | 3 unit | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 36 aplikasi | 18 aplikasi | 20 dok | 0 | 0 | 20 dok | 0 | 0 |
| 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 2,5 | 2,6 | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase perangkat daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Singkawang | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-------------|--------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah laporan/publikasi statistik sektoral dan metadata | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 0 | 0 | 2 buku | 0 | 0 |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PER\$ANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 100% | 100 % | 82,7 % | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan per\$andian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Persentase Penyelenggara an pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|---|---|-------|---|---|
| 2.21.02.2.01.01 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 0 | 0 | 1 dok | 0 | 0 |
|-----------------|--|---|-------|-------|-------|---|---|-------|---|---|

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai dengan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2023 - 2026, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 4 (empat) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|------------------------------|-----|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang | - | - | 2,65 (Baik)- | 2,7 (Baik) | 2,75 (Baik) | 2,8 (Baik) | - | - | 2,85 (Baik) | 2,9 (Baik) | - |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kota Singkawang dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan

atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo, statistik, dan persandian;
- 2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai;
- 3) Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
- 4) Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi hasil pembangunan melalui FK Metra belum optimal;
- 6) Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
- 7) Perlunya optimalisasi peran dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat;
- 8) Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik;
- 9) Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
- 10) Kurangnya pedoman pengelolaan informasi dan komunikasi berklasifikasi;
- 11) Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
- 12) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan *updating* data statistik sektoral yang belum optimal;
- 13) Pembangunan aplikasi dengan *platform* dan struktur berbeda;
- 14) Pengelolaan pusat *application protocol interface* belum optimal;
- 15) Belum adanya data center;
- 16) Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;
- 17) Integrasi Sistem Informasi belum tercapai;
- 18) Kurangnya pedoman teknis terkait *E-Government*;
- 19) Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2023 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi

juga mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima Pemerintah Kota Singkawang kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.5.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|------------|---|----------------|-----------------------------|--|------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Singkawang | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 8.847.586.425,69 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Singkawang | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 7.187.187.955,33 | - |
| A | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Singkawang | Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja | 100% | 45.150.000,00 | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Singkawang | Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja | 100% | 43.000.000,00 | - |

| | Daerah | | Perangkat Daerah | | | Daerah | | Perangkat Daerah | | | |
|---|--|------------|--|-------|---------------|--|------------|--|-------|---------------|---|
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Singkawang | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dok | 10.500.000,00 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Singkawang | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dok | 10.000.000,00 | - |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 6.300.000,00 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 6.000.000,00 | - |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4.200.000,00 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4.000.000,00 | - |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 4.200.000,00 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 4.000.000,00 | - |
| 5 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- | 1 dok | 4.200.000,00 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- | 1 dok | 4.000.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------|------------------|---|------------|--|----------|------------------|---|
| | | | SKPD | | | | | SKPD | | | |
| 6 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dok | 5.250.000,00 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dok | 5.000.000,00 | - |
| 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Singkawang | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | 1 dok | 10.500.000,00 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Singkawang | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | 4 dok | 10.000.000,00 | - |
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.904.226.425,69 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.826.387.955,33 | - |
| 8 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Singkawang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 orang | 2.759.326.425,69 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Singkawang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 orang | 2.688.387.955,33 | - |
| 9 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 136.500.000,00 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 130.000.000,00 | - |
| 10 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ | Singkawang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ | 1 dok | 3.150.000,00 | Pelaksanaan penatausahaan dan | Singkawang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | 100% | 3.000.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-------|---------------|---|------------|--|-------|---------------|---|
| | verifikasi keuangan SKPD | | Verifikasi Keuangan SKPD | | | pengujian/verifikasi keuangan SKPD | | Keuangan SKPD | | | |
| 11 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dok | 5.250.000,00 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dok | 5.000.000,00 | - |
| C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Singkawang | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 10.500.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Singkawang | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000,00 | |
| 12 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Singkawang | Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun | 1 dok | 5.250.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Singkawang | Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun | 1 dok | 5.000.000,00 | |
| 13 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Singkawang | Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 100% | 5.250.000,00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Singkawang | Cakupan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 100% | 5.000.000,00 | |
| D | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan | 100% | 22.050.000,00 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan | 100% | 21.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|------------|----------------|--|------------|---|------------|----------------|---|
| | | | perangkat | | | | | perangkat | | | |
| 14 | Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah menara telekomunikasi yang didata | 124 menara | 15.750.000,00 | Pendapatan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah menara telekomunikasi yang didata | 117 menara | 15.000.000,00 | |
| 15 | Pendapatan Wajib Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah | 0 dok | 6.300.000,00 | Pendapatan Wajib Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah | 117 menara | 6.000.000,00 | |
| E | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 50.500.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Singkawang | Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 33.700.000,00 | |
| 16 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Singkawang | Persentase pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 0 stel | 50.500.000,00 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Singkawang | Persentase pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 32 orang | 33.700.000,00 | |
| F | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Singkawang | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 243.600.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Singkawang | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 100% | 504.400.000,00 | |
| 17 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Singkawang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 13.000.000,00 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Singkawang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 15.600.000,00 | - |
| 18 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Singkawang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 36.000.000,00 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Singkawang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 36.000.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|-------------|----------------|---|-------------------|--|--------------|-------------------------|---|
| 19 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Singkawang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 41.000.000,00 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Singkawang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 49.200.000,00 | - |
| 20 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Singkawang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 3.600.000,00 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Singkawang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100% | 3.600.000,00 | - |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 laporan | 150.000.000,00 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Singkawang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 400.000.000,00 | - |
| G | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Singkawang | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Singkawang | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 2.500.000.000,00 | |
| 22 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Singkawang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Singkawang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit mobil | 300.000.000,00 | |
| 23 | Pengadaan Mebel | Singkawang | Cakupan Pengadaan mebel yang tersedia | 0% | 0 | Pengadaan Mebel | Singkawang | Cakupan Pengadaan mebel yang tersedia | 100% | 200.000.000,00 | |
| 24 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Singkawang | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang | 0 unit | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Singkawang | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 unit | 2.000.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----------|----------------|---|------------|--|------|------------------|---|
| | | | disediakan | | | | | | | | |
| H | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Singkawang | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 883.600.000,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Singkawang | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 1.082.400.000,00 | - |
| 25 | Penyediaan jasa surat menyurat | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 3.600.000,00 | Penyediaan jasa surat menyurat | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 36.000.000,00 | - |
| 26 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 laporan | 200.000.000,00 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100% | 231.600.000,00 | - |
| 27 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 680.000.000,00 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% | 814.800.000,00 | - |
| I | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 144.327.939,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 210.000.000,00 | - |
| 28 | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, | Singkawang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara | 2 unit | 46.000.000,00 | Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, | Singkawang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan | 100% | 55.200.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|-------------|-------------------------|--|-------------------|---|-------------|-------------------------|----------|
| | pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| 29 | Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Singkawang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 98.327.939,00 | Pemeliharaa/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Singkawang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 77 Unit | 154.800.000,00 | - |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Singkawang | Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik | 100% | 1.314.320.551,50 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Singkawang | Persentase Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik | 100% | 1.251.742.430,00 | - |
| J | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah | 100% | 1.314.320.551,50 | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah | 100% | 1.251.742.430,00 | - |
| 30 | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 dok | 29.277.030,83 | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 perwa ko | 27.882.886,50 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|---------|----------------|--|------------|--|-----------------------------|----------------|---|
| 31 | Monitoring opini dan aspirasi publik | Singkawang | Jumlah hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/ atau isu terindikasi krisis | 0 | 29.277.030,83 | Monitoring opini dan aspirasi publik | Singkawang | Jumlah hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis | 4 laporan | 27.882.886,50 | - |
| 32 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Singkawang | Rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis | 0 | 29.277.030,83 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Singkawang | Rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemerintah Daerah kepada pimpinan daerah, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis | 4 laporan | 27.882.886,50 | - |
| 33 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 300 dok | 156.229.365,60 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 300 konten | 148.789.872,00 | - |
| 34 | Pengelolaan media komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 800 dok | 603.561.971,25 | Pengelolaan media komunikasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 800 konten informasi/berita | 574.820.925,00 | - |
| 35 | Pelayanan informasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 4 dok | 38.152.453,50 | Pelayanan informasi publik | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 4 laporan | 36.335.670,00 | - |
| 36 | Layanan hubungan media | Singkawang | Jumlah konferensi pers/kunjungan pers, pertemuan dengan media dan | 0 | 38.152.453,50 | Layanan hubungan media | Singkawang | Jumlah konferensi pers/kunjungan pers, pertemuan dengan media dan liputan | 6 kegiatan | 36.335.670,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|-------------|-------------------------|---|-------------------|--|-------------|-------------------------|----------|
| | | | liputan media yang dilaksanakan | | | | | media yang dilaksanakan | | | |
| 37 | Kemitraan dengan pemangku kepentingan | Singkawang | Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi | 0 | 336.881.734,35 | Kemitraan dengan pemangku kepentingan | Singkawang | Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi | 15 kegiatan | 320.839.747,00 | - |
| 38 | Menajemen komunikasi krisis | Singkawang | Jumlah laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis | 0 | 29.277.030,83 | Menajemen komunikasi krisis | Singkawang | Jumlah laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis | 2 laporan | 27.882.886,50 | - |
| 39 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Singkawang | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik | 0 | 24.243.450,00 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Singkawang | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik | 1 kegiatan | 23.089.000,00 | - |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Singkawang | Persentase Penerapan aplikasi e-Government | 100% | 1.843.739.037,00 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Singkawang | Persentase Penerapan aplikasi e-Government | 100% | 2.645.000.000,00 | - |
| K | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapka Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 2.310.000.000,00 | Pengelolaan nama domain yang telah ditetapka oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 2.200.000.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------|
| 40 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi | Singkawang | Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat | 85 sub domain, 12 server | 210.000.000,00 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi | Singkawang | Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat | 85 Sub Domai n 12 Server | 200.000.000,00 | - |
| 41 | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah | Singkawang | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 81 unit kerja | 2.100.000.000,00 | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah | Singkawang | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 30 CCTV, 29 OPD, 26 Kelurahan | 2.000.000.000,00 | - |
| L | Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 357.250.000,00 | Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota | Singkawang | Persentase Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 445.000.000,00 | - |
| 42 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | Singkawang | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 3 perangkat daerah | 26.250.000,00 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | Singkawang | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 3 integrasi aplikasi | 25.000.000,00 | - |
| 43 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Singkawang | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 unit | 63.000.000,00 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Singkawang | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 aplikasi | 60.000.000,00 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--------|----------------|---|------------|--|---|----------------|---|
| 44 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Singkawang | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 dok | 100.000.000,00 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Singkawang | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 2 dimensi (smart government and branding) | 200.000.000,00 | |
| 45 | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 20 dok | 105.000.000,00 | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 20 aplikasi | 100.000.000,00 | - |
| 46 | Monitoring, evaluasi, pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Singkawang | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 1 dok | 63.000.000,00 | Monitoring, evaluasi, pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Singkawang | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 2,6 | 60.000.000,00 | - |
| IV | PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL | Singkawang | Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website | 100% | 650.000.000,00 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL | Singkawang | Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Terintegrasi Dengan Website | 100% | 800.000.000,00 | - |
| M | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah | Singkawang | Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang | 100% | 650.000.000,00 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah | Singkawang | Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang | 100% | 800.000.000,00 | - |

| | Kabupaten/Kota | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | |
|----|---|------------|---|--------|----------------|---|------------|--|------------|----------------|---|
| 47 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Singkawang | Jumlah laporan/ publikasi statistik sektoral dan metadata | 2 buku | 200.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Singkawang | Jumlah laporan/publikasi statistik sektoral dan metadata | 1 buku | 200.000.000,00 | |
| 48 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Singkawang | Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang | 0 | 150.000.000,00 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Singkawang | Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang | 1 kegiatan | 150.000.000,00 | |
| 49 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Singkawang | Jumlah Laporan/ Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang | 0 | 250.000.000,00 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Singkawang | Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang | 1 buku | 250.000.000,00 | |
| 50 | Pengembangan Infrastruktur | Singkawang | Jumlah infrastruktur dan pemeliharaan peralatan pendukung penyelenggaraan statistik sektoral | 0 | 50.000.000,00 | Pengembangan Infrastruktur | Singkawang | Jumlah infrastruktur dan pemeliharaan peralatan pendukung penyelenggaraan statistik sektoral | 1 paket | 200.000.000,00 | |
| V | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PER\$ANDIAN | Singkawang | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan | 100% | 330.000.000,00 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PER\$ANDIAN | Singkawang | Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan | 100% | 300.000.000,00 | - |

| | UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | Layanan Keamanan Informasi | | | UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | Layanan Keamanan Informasi | | | |
|----|--|------------|--|-------|----------------|--|------------|--|-------------------|----------------|---|
| N | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota | Singkawang | Persentase Penyelenggaraa n Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 330.000.000,00 | Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota | Singkawang | Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 500.000.000,00 | - |
| 51 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Jumlah dokumen kebijakan penata kelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah | 1 dok | 150.000.000,00 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Jumlah dokumen kebijakan penata kelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah | 1 dok | 150.000.000 | |
| 52 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Singkawang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 0 | 150.000.000,00 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Singkawang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 kegiat an | 150.000.000,00 | - |
| 53 | Penyediaan Layanan Keamanan | Singkawang | Jumlah ketersediaan dan pemeliharaan | 0 | 30.000.000,00 | Penyediaan Layanan Keamanan | Singkawang | Jumlah ketersediaan dan pemeliharaan peralatan | 2 paket | 200.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota | | peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah | | | Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota | | pendukung keamanan informasi Pemerintah | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tidak Ada Usulan | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

Telaah terhadap RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada RPD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1.2 TELAAHAN RENJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 DAN RENJA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 – 2023

3.1.2.1 TELAAHAN RENJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan

startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

3.1.2.2 TELAAHAN RENJA DISKOMINFO PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2019–2023 yang akan direalisasikan adalah:

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk

mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya

dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.1.2.4 TELAAH RTRW KOTA SINGKAWANG 2021-2041

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2021-2041, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

- a. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada

sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran :

- 1) Indeks SPBE Pemerintah Kota Singkawang.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|--------------|--|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | 100% | 7.807.840.640, 00 | APBD Kota | - | 100% | 7.807.840.640,00 |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi | Singkawang | 100% | 43.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 43.000.000,00 |

| | | Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------|---------------|-----------|---|-------|---------------|
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Singkawang | 1 dok | 10.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 10.000.000,00 |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Singkawang | 1 dok | 6.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 6.000.000,00 |
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Singkawang | 1 dok | 4.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 4.000.000,00 |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Singkawang | 1 dok | 4.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 4.000.000,00 |
| 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Singkawang | 1 dok | 4.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 4.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Singkawang | 1 dok | 5.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dok | 5.000.000,00 |
| 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | Singkawang | 1 dok | 10.000.000,00 | APBD Kota | - | 4 dok | 10.000.000,00 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | Singkawang | 100% | 3.328.351.454,00 | APBD Kota | - | 100% | 3.328.351.454,00 |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Singkawang | 35 orang | 3.191.501.454,00 | APBD Kota | - | 35 orang | 3.191.501.454,00 |
| 2.16.01.2.02.02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Singkawang | 100% | 128.850.000,00 | APBD Kota | | 100% | 128.850.000,00 |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Singkawang | 1 dok | 3.000.000,00 | APBD Kota | | 1 dok | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Singkawang | 1 dok | 5.000.000,00 | APBD Kota | | 1 dok | 5.000.000,00 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelyanan Administrasi Umum | Singkawang | 100% | 408.958.336,00 | APBD Kota | - | 100% | 408.958.336,00 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Singkawang | 100% | 22.906.440,00 | APBD Kota | - | 100% | 22.906.440,00 |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Singkawang | 100% | 100.374.096,00 | APBD Kota | - | 100% | 100.374.096,00 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Singkawang | 100% | 31.833.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 31.833.000,00 |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Singkawang | 100% | 3.844.800,00 | APBD Kota | - | 100% | 3.844.800,00 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Singkawang | 100% | 250.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 250.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | 100% | 1.070.188.930,00 | APBD Kota | - | 100% | 1.070.188.930,00 |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Singkawang | 100% | 4.197.120,00 | APBD Kota | - | 100% | 4.197.120,00 |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya,air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Singkawang | 100% | 274.744.786,000 | APBD Kota | - | 100% | 274.744.786,000 |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Singkawang | 100% | 791.247.024,00 | APBD Kota | - | 100% | 791.247.024,00 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Singkawang | 100% | 129.841.920,00 | APBD Kota | - | 100% | 129.841.920,00 |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Singkawang | 100% | 67.804.800,00 | APBD Kota | - | 100% | 67.804.800,00 |
| 2.16.01. 2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung | Singkawang | 100% | 62.037.120,00 | APBD Kota | - | unit | 62.037.120,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| | kantor atau bangunan lainnya | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | |
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik | Singkawang | 100% | 817.247.696,00 | APBD Kota | - | 100% | 817.247.696,00 |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah | Singkawang | 100% | 817.247.696,00 | APBD Kota | - | 100% | 817.247.696,00 |
| 2.16.02.2.01.01 | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Singkawang | 1 perwako | 17.097.100,00 | APBD Kota | - | 1 perwako/k epwako | 17.097.100,00 |
| 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis | Singkawang | 4 laporan | 53.711.147,00 | APBD Kota | - | 4 laporan | 53.711.147,00 |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Singkawang | 300 konten/info grafis | 55.112.500,00 | APBD Kota | - | 300 konten | 55.112.500,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Singkawang | 800 konten informasi/berita | 367.372.900,00 | APBD Kota | - | 800 konten informasi/berita | 367.372.900,00 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan informasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Singkawang | 4 laporan | 262.000.000,00 | APBD Kota | - | 4 laporan | 262.000.000,00 |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan hubungan media | Jumlah konferensi pers/kunjungan pers, pertemuan dengan media dan liputan media yang dilaksanakan | Singkawang | 6 kegiatan | 12.465.200,00 | APBD Kota | - | 6 kegiatan | 12.465.200,00 |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan pemangku kepentingan | Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi | Singkawang | 5 kegiatan | 39.244.249,00 | APBD Kota | - | 15 Kegiatan | 39.244.249,00 |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik | Singkawang | 1 kegiatan | 10.244.600,00 | APBD Kota | - | 1 kegiatan | 10.244.600,00 |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Penerapan aplikasi e-Government | Singkawang | 100% | 1.843.739.037,00 | APBD Kota | - | 100% | 1.843.739.037,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Perentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | 100% | 1.496.643.382,00 | APBD Kota | - | 100% | 1.496.643.382,00 |
| 2.16.03.2.02 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat | Singkawang | 85 Sub Domain 12 Server | 210.000.000,00 | APBD Kota | - | 85 sub domain, 12 server | 210.000.000,00 |
| 2.16.03.2.03 | Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Singkawang | 29 OPD 30 CCTV | 1.286.643.382,00 | APBD Kota | - | 30 CCTV, 29 OPD, 26 KEL | 1.286.643.382,00 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-Government Dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Perentase Pengelolaan E-Goverment Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | 100% | 357.250.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 357.250.000,00 |
| 2.16.03.2.02.06 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Singkawang | 3 integrasi aplikasi | 26.250.000,00 | APBD Kota | - | 3 integrasi aplikasi | 26.250.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------------|----------------|-----------|---|-------------|----------------|
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Singkawang | 3 aplikasi | 63.000.000,00 | APBD Kota | - | 3 aplikasi | 63.000.000,00 |
| 2-16-03-2.02-09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | Singkawang | 1 dokumen | 100.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 dokumen | 100.000.000,00 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Singkawang | 20 aplikasi | 105.000.000,00 | APBD Kota | - | 20 aplikasi | 105.000.000,00 |
| 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | Singkawang | 75% | 63.000.000,00 | APBD Kota | - | 2,6 | 63.000.000,00 |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya Terintegrasi dengan Website | Singkawang | 100% | 200.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|------------|----------------|-----------|---|------------|----------------|
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang | Singkawang | 100% | 200.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 200.000.000,00 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah laporan/publikasi statistik sektoral dan metadata | Singkawang | 1 buku | 15.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 buku | 15.000.000,00 |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang | Singkawang | 3 kegiatan | 20.000.000,00 | APBD Kota | | 3 kegiatan | 20.000.000,00 |
| 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang | Singkawang | 1 buku | 15.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 buku | 15.000.000,00 |
| 2.20.02.2.01.05 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah infrastruktur dan pemeliharaan peralatan pendukung penyelenggaraan statistik sektoral | Singkawang | 1 paket | 150.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 paket | 150.000.000,00 |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Singkawang | 100% | 175.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 175.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|------------|-------------------|-----------|---|------------|-------------------|
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | 100% | 175.000.000,00 | APBD Kota | - | 100% | 175.000.000,00 |
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan penata kelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah | Singkawang | 3 dokumen | 20.000.000,00 | APBD Kota | - | 3 dokumen | 20.000.000,00 |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Singkawang | 1 kegiatan | 55.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 kegiatan | 55.000.000,00 |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ketersediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah | Singkawang | 1 paket | 100.000.000,00 | APBD Kota | - | 1 paket | 100.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 10.853.981.718,00 | | | | 10.853.981.718,00 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tabel 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

| KODE | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | PENERIMA MANFAAT | INDIKATOR | | PAGU INDIKATOR | PRAKIRAAN MAJU | SUMBER ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------------|---|------------|--|--|--------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | | OUTPUT KEGIATAN | | | | | |
| | | | | TOLOK UKUR | TARGET | | | | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 7.807.840.640,00 | 7.807.840.640,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dok | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dok | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--|---|-------|--------------|--------------|-----------|--|
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dok | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 1 dok | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | | | Kinerja SKPD | | | | | |
| 2.16.01.2.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah | 1 dok | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 3.328.351.454,00 | 3.328.351.454,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 orang | 3.191.501.454,00 | 3.191.501.454,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.02.02 | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 128.850.000,00 | 128.850.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.02.03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 dok | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dok | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan | Persentase Pelayanan Administrasi | 100% | 408.958.336,00 | 408.958.336,00 | APBD KOTA | |

| | | | Informatika Kota Singkawang | Umum | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--|
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100% | 22.906.440,00 | 22.906.440,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 100.374.096,00 | 100.374.096,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 100% | 31.833.000,00 | 31.833.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100% | 3.844.800,00 | 3.844.800,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 1.070.188.930,00 | 1.070.188.930,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 4.197.120,00 | 4.197.120,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya,airdan listrik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100% | 274.744.786,00 | 274.744.786,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100% | 791.247.024,00 | 791.247.024,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 129.841.920,00 | 129.841.920,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100% | 67.804.800,00 | 67.804.800,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.01.2.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100% | 62.037.120,00 | 62.037.120,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 2.16.02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik | 100% | 817.247.696,00 | 817.247.696,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Daerah | 100% | 817.247.696,00 | 817.247.696,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.01 | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 perwako | 17.097.100,00 | 17.097.100,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/ atau isu terindikasi krisis | 4 laporan | 53.711.147,00 | 53.711.147,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 300 konten/ info grafis | 55.112.500,00 | 55.112.500,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan media komunikasi publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 800 konten informasi/ berita | 367.372.900,00 | 367.372.900,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--|
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan informasi publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 4 laporan | 262.000.000,00 | 262.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan hubungan media | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah konferensi pers/kunjungan pers, pertemuan dengan media dan liputan media yang dilaksanakan | 6 kegiatan | 12.465.200,00 | 12.465.200,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.09 | Kemitraan dengan pemangku kepentingan | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah peserta pembinaan, pemberdayaan, dan desimilasi informasi melalui komunikasi | 5 kegiatan | 39.244.249,00 | 39.244.249,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.02.2.01.11 | Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan layanan informasi publik | 1 kegiatan | 10.244.600,00 | 10.244.600,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Penerapan aplikasi e-Government | 100% | 1.843.739.037,00 | 1.843.739.037,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di | 100% | 1.496.643.382,00 | 1.496.643.382,00 | APBD KOTA | |

| | | | | Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| 2.16.03.2.02 | Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah domain dan subdomain pemkot Singkawang yang terbangun, Jumlah ruang server yang dirawat | 85 Sub Domain 12 Server | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.03 | Penyelenggaraan sistem jaringan intrapemerintah daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 29 OPD 30 CCTV | 1.286.643.382,00 | 1.286.643.382,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-Goverement Dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Pengelolaan E-Goverment Dilinkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 357.250.000,00 | 357.250.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.06 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 3 integrasi aplikasi | 26.250.000,00 | 26.250.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.07 | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 aplikasi | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan KotaCerdas | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 dokumen | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.10 | Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 20 aplikasi | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.16.03.2.12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 75% | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya Terintegrasi dengan Website | 100% | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang | 100% | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah laporan/ publikasi statistik | 1 buku | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| | dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | Kota Singkawang | sektoral dan metadata | | | | | |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Singkawang | 3 kegiatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan/Publikasi Metadata Indikator sesuai Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Singkawang | 1 buku | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.20.02.2.01.05 | Pengembangan Infrastruktur | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah infrastruktur dan pemeliharaan peralatan pendukung penyelenggaraan statistik sektoral | 1 paket | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERJANDIAN UNTUK PENGAMANANINFORMASI | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 100% | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Perjandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | APBD KOTA | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--|--|------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 2.21.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah dokumen kebijakan penata kelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah | 3 dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 kegiatan | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | APBD KOTA | |
| 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Singkawang | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | Jumlah ketersediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung keamanan informasi Pemerintah | 1 paket | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | APBD KOTA | |
| JUMLAH USULAN MUSRENBANG (1) | | | | | | 0 | 0 | | |
| JUMLAH USULAN RENJA (2) | | | | | | 10.853.981.718,00 | 10.853.981.718,00 | | |
| JUMLAH USULAN POKIR (3) | | | | | | 0 | 0 | | |
| JUMLAH TOTAL (1+2+3) | | | | | | 10.853.981.718,00 | 10.853.981.718,00 | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2024 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#